

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023**

RLPPD



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN 2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) TAHUN 2023**



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(R L P P D)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Untuk itu Penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu sesuai dengan amanat pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Ringkasan LPPD memuat a) capaian kinerja makro; b) ringkasan capaian urusan pelayanan dasar; c) hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya; d) ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan e) inovasi daerah. Ringkasan LPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2023 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberikan tanggapan, saran dan kritik guna perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

1. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Lombok Tengah dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) pada tanggal 14 Agustus 1958;

2. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Lombok Tengah terletak diantara 116°05' - 116°24' Bujur Timur dan 8°24' - 8°57' Lintang Selatan, luas wilayah 1.208,39 km² (1.208.390 Ha), dengan peta Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur,
- Sebelah Selatan: Samudera Indonesia;
- Sebelah Barat: Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur: Kabupaten Lombok Timur.

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023 terdiri dari 12 kecamatan, 142 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah dusun 1.795 dusun dan 71 lingkungan.

3. Jumlah Penduduk

Kondisi demografis Kabupaten Lombok Tengah dalam laporan ini akan digambarkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember Tahun 2023 adalah 1.091.564 jiwa yang terdiri dari 542.205 jiwa penduduk laki-laki dan 549.359 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan luas wilayah seluas 1.208,39 km2, maka tercatat kepadatan penduduk sebesar 869,52 jiwa/km².

B. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun capaian indikator kinerja makro Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 s.d 2023 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N	PERUBAHAN PERUBAHAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	67.57	70.41	2.84
2	Angka Kemiskinan	12,89	12.93	0.04
3	Angka Pengangguran	3,02	2.78	-0.29
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,55	5.77	2.22
5	Pendapatan Perkapita	17.991	19.501	1.51
6	Ketimpangan Pendapatan (Guni Ratio)	0.313	0.349	0.036

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah.

2. Ringkasan Capaian Urusan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 tergambar pada tabel berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Satuan	Target	realisasi	%
1	Pendidikan Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	63,922	48.317	75.59

2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	Orang	187,536	182,788	97.47
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	2,797	2,326	83.16

b. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten dalam penerapan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	17288	17288	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar di fasilitas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	17288	1195	99.46 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	17277	17203	99.57 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	71400	60180	84.29 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	151107	120541	79.77 %
6	Pelayana Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	638000	138045	21.64 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	108621	72926	67.14 %

NO	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
8	Pelayan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	Orang	46514	41884	90.05 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetesmellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	10154	9287	91.46 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Orang	1976	1976	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	17680	11.500	65.06 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) mendapatkan layanan kesehatan	Orang	23234	21208	91.28 %

c. Urusan Pekerjaan Umum

Pencapaian pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum tergambar pada tabel berikut :

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	21840	21840	100
2	Penyediaan pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	KK (TS) KK (IPAL)	5456	5456	100

d. Urusan Perumahan Rakyat

Pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 tergambar pada tabel berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan & rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Presentasi rumah tangga korban bencana yang ditangani	persen	1	1	100
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten kota	Presentase Rumah Tangga terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Orang	1	1	100 %

e. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pencapaian SPM urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten Lombok Tengah dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Kasus	30	30	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	orang	250	250	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	400	400	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	3252	3252	100
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	orang	11	11	100

f. Urusan Sosial

Pencapaian SPM urusan social pada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebagaimana pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantr di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	2082	1378	66.19
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantr di luar panti	Jumlah anak terlantr yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	12948	6918	53.43
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantr di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantr yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	9069	27.17	29.96
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	0	0	100
5.	Perlindungan dan Jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Orang	2158	2158	100

3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Kunci sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93,17293	Disdik
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,62165	Disdik
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,13082	Disdik
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	84,75157	Disdik
2	Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,431491%	Dikes
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dikes
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dikes
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,31936%	Dikes
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,57168%	Dikes
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84,28571%	Dikes
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79,77195%	Dikes
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	16,07311%	Dikes
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50,38553%	Dikes
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,04601%	Dikes
		1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,46149%	Dikes
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Dikes
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dikes
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	91,28002%	Dikes
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	87,14971	Disperkim
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Disperkim
		1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	91,97767	Dis. PUPR
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang	83,66619	Dis.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		PUPR
		1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	Dis. PUPR
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	DPMPPTS P
		1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	72,37995	Dis. PUPR
		1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	55,6962	Dis. PUPR
		1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dis. PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Disperkim
		1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Disperkim
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	49,63612	Disperkim
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,157981	Disperkim
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	Disperkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60,86957	Satpol PP
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	31,78879	BPBD
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	34,86094	BPBD
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Dis. Damkartan
		1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,9	Dis. Damkartan
6	Sosial	1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	84,8251	Dinsos
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinsos
7	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Disnakertrans
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21,10164%	Disnakertrans
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3457,369	Disnakertrans
		2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	98,13333%	Disnakertrans
		2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	96,50138%	Disnaker

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota		trans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,00405	DP3AP2 KB
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	DP3AP2 KB
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,822637	DP3AP2 KB
9	Pangan	2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	72,35943	Dis. Ketahanan Pangan
10	Pertanahan	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	DPMPTSP
		2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	Disperkim
		2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	96,89202	Disperkim
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Disperkim
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	DPMPTSP
		2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Disperkim
11	Lingkungan Hidup	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	67,18	DLH
		2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	31,15025	DLH
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	73,07692	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	99,33347	Disdukcapil
		2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	43,72967	Disdukcapil
		2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	98,35946	Disdukcapil
		2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	18,18182	Disdukcapil
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.l.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	DPMD
		2.l.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	56	DPMD
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,37	DP3AKB
		2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,84585	DP3AKB
		2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,2231	DP3AKB
15	Perhubungan	2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,5	Dishub
		2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,26	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	26,66667	Diskominfo
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	96,51163	Diskominfo

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
		2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Diskominfo
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	66,88312	Diskop UKM
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	5,440138	Diskop UKM
18	Penanaman Modal	2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	112,4761	Dpmptsp
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	27,8561	DISPORA
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	21,21862	DISPORA
		2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	0	DISPORA
20	Statistik	2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo
		2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo
21	Persandian	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	46,20155	Diskominfo
22	Kebudayaan	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dispar
23	Perpustakaan	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55,31	Dis. Perpus Arsip
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	61,32	Dis. Perpus Arsip
24	Kearsipan	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75%	Dis. Perpus Arsip
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0,67	Dis. Perpus Arsip
25	Kelautan dan Perikanan	3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	107,2113	DISLUTKAN
26	Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	160,8403	DISPAR
		3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	69,88632	DISPAR
		3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	25,9028	DISPAR
		3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,267432	DISPAR
		3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	24,09347	DISPAR
27	Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	508,8142	Dinas Pertanian
		3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	-95,37146	Dinas Pertanian
28	Kehutanan	3.d		-	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100	DPMPTSP
30	Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	100	DPMPTSP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
			Toko Swalayan)		
		3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	98,30732	DISPERI NDAG
		3.f.3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6,488343	DISPERI NDAG
31	Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	0,156569	DISPERI NDAG
		3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	DISPERI NDAG
		3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DISPERI NDAG & DPMPTS P
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DISPERI NDAG & DPMPTS P
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	DISPERI NDAG & DPMPTS P
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	65	DISPERI NDAG
32	Transmigrasi	3.h		-	

4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam rangka mendukung pencapaian penyelenggaraan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka di bentuk beberapa OPD penunjang. Adapun capaian kinerja OPD penunjang dapat dilihat pada capaian dikator sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
33	Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	11,99372	BKAD
		4.a.2	Rasio PAD	12,03263	BKAD
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat
		4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	70,28052	BKAD
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	10	BKAD
34	Pengadaan	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	SETDA
		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	7,799145	PBJ setda
		4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	0	PBJ setda

		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-63,64393	PBJ setda
35	Kepegawaian	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	70,31905	BKPP
		4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,52233	BKPP
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	67,24684	BKPP
36	Manajemen Keuangan	4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,471769	BKAD
		4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,21412	BKAD
		4.d.3	Manajemen Aset	4	BKAD
		4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	1,66893	BKAD
37	Transparansi dan Partisipasi Publik	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	97,89804	DISKOMINFO
		4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	DISKOMINFO

5. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022			2023		
			TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %
1	Indeks Toleransi	Poin	3,63	3,68	101,38	3,06	3,7	120,92
2	Persentase penurunan konflik berlatar belakang agama	Persen	100	100	100	100	100	100
3	IPM	Poin	66,88	67,57	101,03	67,17	70,41	104,82
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	CC	92,9	B	BB	117,11
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,1	3,55	114,52	4,06	5,77	142,12
6	Angka Kemiskinan	Persen	13,03	12,89	101,07	13,13	12,93	101,52
7	Indeks Gini	Poin	0,329	0,313	104,86	0,328	0,349	93,60
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,8	3,02	92,14	2,66	2,78	95,49
9	Indeks Infrastruktur Wilayah (IFW)	Poin	66,55	63,67	95,67	68,05	65,45	96,18

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022			2023		
			TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %
10	Pelanggaran adat diselesaikan melalui krame adat	Persen	100	100	100	100	100	100
11	Laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum	Persen	1,55	30,92	1994,84	2,75	8,62	313,45
12	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Pendidikan	Poin	0,596	0,6	100,67	0,599	0,607	101,34
14	Indeks Kesehatan	Poin	0,717	0,719	100,28	0,721	0,792	109,85
15	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100,3	B	B	100,21
16	Persentase OPD dengan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat Baik	Persen	85	100	117,65	90	79,2	88,00
17	Rata-rata pengeluaran perkapita	Juta Rupiah/ tahun	9,971	10,47	105,00	10	10,95	109,50
18	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	1,33	1,62	121,80	2,53	2,03	80,24
19	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	1,16	1,67	143,97	1,26	2,23	176,98
20	Indeks konektivitas	Poin	73,022	85,2	116,68	79,764	72,8	91,27
21	Indeks kinerja sistem irigasi	Poin	61,1	67,7	110,80	63,3	53,54	84,58
22	Cakupan layanan air minum	Persen	78,28	80,37	102,67	78,78	83,77	106,33
23	Luasan penanganan kawasan kumuh	ha	795,37	754,37	105,15	785,37	744,37	105,22
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	60,33	63,17	104,71	60,6	67,18	110,86
25	Cakupan layanan persampahan	Persen	27,3	29,43	107,80	28,3	31,15	110,07
26	Persentase krame adat aktif	Persen	75	76	101,33	77	75	97,40

C. **HASIL EVALUSAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

- Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten lombok tengah terakhir tahun 2023 terhadap LPPD 2022 dengan nilai 2,9223 (predikat **SEDANG**)

2. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) , merupakan predikat WTP ke sepuluh sejak tahun 2001.

D. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Adapun target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.379.733.150.308,00. Dari target pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mampu mencapai realisasi dari keseluruhan sumber pendapatan daerah sebesar Rp2.278.034.645.741,39 atau 95,73%. Selanjutnya secara lebih rinci target dan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut ini:

KODE	URAIAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	PERSENT ASE
1	2	3	4	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.379.733.150.308,00	2.278.034.645.741,39	95,73
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	367.199.446.978,00	274.070.631.536,39	74,64
4 . 1 . 1	Hasil Pajak Daerah	206.993.273.731,00	147.784.376.217,21	71,40
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	32.689.670.777,00	20.779.763.781,60	63,57
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.824.141.617,00	11.824.141.617,00	100,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	115.692.360.853,00	93.682.349.920,58	80,98
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.981.312.476.985,00	1.972.976.082.091,00	99,58
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.848.973.313.867,00	1.853.774.800.135,00	100,26
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	1.676.346.456.867,00	1.681.147.943.135,00	100,29
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.734.038.000,00	5.734.038.000,00	100,00
4 . 2 . 1 . 5	Dana Desa	166.892.819.000,00	166.892.819.000,00	100,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	132.339.163.118,00	119.201.281.956,00	90,07
4 . 2 . 2 . 1	Pendapatan Bagi Hasil	128.053.002.018,00	115.616.707.956,00	90,29
4 . 2 . 2 . 2	Bantuan Keuangan	4.286.161.100,00	3.584.574.000,00	83,63
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.221.226.345,00	30.987.932.114,00	99,25
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	415.724.000,00	477.993.693,00	114,98
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.805.502.345,00	30.509.938.421,00	99,04

Sumber: BKADKab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

2. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Adapun target Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran2023 sebesar Rp2.401.692.492.280,00 dengan realiasi sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp2.261.203.510.926,43 sebesar 94,15 %.

Selanjutnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada table berikut ini:

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.797.873.597.486,00	1.683.445.385.875,43	93,64
2.	Belanja Modal	245.079.393.914,00	236.136.766.381,00	96,35
3.	Belanja Tidak Terduga	19.058.556.265,00	14.359.344.815,00	75,34
4	Belanja Transfer	339.680.944.615,00	327.262.013.855,00	96,34
Jumlah		2.401.692.492.280,00	2.261.203.510.926,43	94,15

Sumber: BKADKab. Lombok Tengah

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi belanja daerah hampir mencapai target sebagaimana amanat APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.

3. Target dan Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 secara lebih rinci sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.860.595.220,00	41.877.095.220,35	100,04

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
06:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	41.854.095.220,00	41.854.095.220,35	100,00
06:01:04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	0.00	0.00	0,00
06:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.500.000,00	23.000.000,00	353,85
06:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
06:02:03	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah	19.901.253.248,00	19.901.253.226,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	21.959.341.972,00	21.975.841.994,35	100,08

Sumber: BKADKab. Lombok Tengah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.877.095.220,35 atau 100,04% dari target sebesar Rp41.860.595.220,00. Realisasi penerimaan ini bersumber dari SiLPA tahun 2022 sebesar Rp41.854.095.220,35, adanya penerimaan pembiayaan berupa penerimaan Kembali pokok investasi yang berasal dari dana bergulir Perkuatan Modal Koperasi senilai Rp23.000.000,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan sebesar Rp19.901.253.226,00 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang kepada PT SMI.

Adapun Nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp.21.975.841.994,35 atau 100,08% dari anggaran Pembiayaan Netto sebesar Rp. 21.959.341.972,00. Sehingga secara keseluruhan SiLPA pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.38.806.976.809,31.